

Pengaruh Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

**Oleh :
Ni Kadek Ayu Trisnadewi**

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 2) Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 3) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris dan *good corporate governance* secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang di peroleh dari www.idx.ci.id. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan uji signifikansi dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Dari hasil persamaan regresi berganda didapat bahwa Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang artinya jika Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* baik, maka akan menyebabkan peningkatan Kinerja keuangan perusahaan. 2) Secara simultan (bersama-sama) Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 56,5%. Berarti Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memberikan sumbangan positif terhadap Kinerja keuangan sebesar 56,5% pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 3) Secara parsial Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci : Dewan Komisaris, GCG dan Kinerja Keuangan

A. PENDAHULUAN

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik, baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG disemua ini masyarakat (Zarkasyi,2008).

GCG akan efektif jika didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan untuk kepentingan perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit merupakan organ perusahaan yang membantu pelaksanaan GCG. Secara umum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajemen atau pengelola

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite, salah satunya adalah Komite Audit. Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan Dewan Komisaris. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Alijoyo dan Subarto, 2003).

Konsep *Corporate Governance* dilatar belakangi oleh masalah pengesahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang dimodelkan dengan *Agency Theory*. Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan dasar yang digunakan untuk membahas *Corporate Governance*. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki

asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005). Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang terkait antara *corporate governance* dengan kinerja organisasi dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan menjadi kewajiban setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan kinerja para manajemen dalam mengendalikan praktek kecurangan dalam korporasi, juga menentukan arah dan pengendalian kinerja perusahaan. Para manajemen puncak korporasi menyelaraskan kepentingannya dengan pemegang saham untuk menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, memonitor kinerja manajemen sebagai acuan pengambilan keputusan maupun tindakan.

Mencapai tujuan organisasi, tata kelola perusahaan mempunyai

tantangan dalam memaksimalkan pencapaian kesejahteraan serta meningkatkan kinerja korporat, termasuk dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi nasional maupun internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang (Widjaja, 2010). Penerapan tata kelola perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atau stakeholders. Sedangkan menurut penelitian Wulandari (2006), penerapan *corporate governance* hanya mencapai 1% taraf kepercayaan terhadap kinerja perusahaan.

Selama proses pengelolaan perusahaan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi kondisi perusahaan lebih banyak dibandingkan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer puncak untuk menggunakan informasi yang diketahuinya dalam memanipulasi pelaporan

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya (Setiawan, dkk. 2006).

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilikan (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

Corporate governance menjadi isu yang sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya mulai mengemuka pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena

lemahnya praktik *corporate governance*. *Corporate governance* mengalami perkembangan sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. *Corporate governance* itu sendiri merupakan tata kelolaan perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan dalam menentukan arah kinerja keuangan perusahaan.

Dalam mengukur kinerja operasi perusahaan dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan melalui kinerja laporan keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin tinggi ROA yang diperoleh maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2001).

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah *corporate governance*. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun

1998 isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dan menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010). Selain *Good Corporate Governance* kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh dewan komisaris.

Penelitian mengenai hubungan Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2013) menemukan komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hastuti (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa 1) Terdapat hubungan yang signifikan antara dewan komisaris dengan kinerja perusahaan, 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara GCG dengan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Isgiyarta dan Tristiarini (2005) menemukan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* mempengaruhi *abnormal return* saham perusahaan.

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Selain itu perusahaan manufaktur lebih banyak atau mendominasi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah dewan komisaris dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Dewan Komisaris

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/MMBU/2002 Pasal 1 poin b, dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan. Sebagai organ perusahaan, dewan komisaris bertugas mengawasi kegiatan perusahaan dan harus memantau efektifitas praktik *corporate governance* perusahaan. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG sesuai dengan aturan. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Zarkasyi (2008).

Adanya organ-organ perusahaan (Dewan Komisaris dan Direksi) merupakan bukti pengaplikasian prinsip GCG dalam tatanan yang minimal. Peranan penting Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG adalah

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi (KNKG, 2006). Menurut Zehnder (2000) dalam FCGI (2002), Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris

seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Ada dua jenis Dewan Komisaris yaitu komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Zarkasyi (2008) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 di kutip dari (FCGI, 2000). Dekemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Artinya persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen

adalah 30% dari jumlah anggota komisaris.

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*

Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance (FCCG)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Sukrisno (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang

transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Pengertian dan konsep *Corporate Governance* dilandasi dengan Teori Agensi (*agency theory*) dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009). Dengan adanya mekanisme *corporate governance* ini, maka tindakan kecurangan yang akan dilakukan agen dapat dieliminasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu:

a. *Transparancy* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi,

hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

c. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-lainnya.

d. *Independency* (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Menurut Pramono dalam Sutedi (2011) Direksi dan Komisaris dipandang sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan

sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran perusahaan mengenai target pencapaian kegiatan pelaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang terdapat dalam strategi suatu perusahaan. Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Jumingan (2006), kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek himpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan Sutrisno (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan pada suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan

dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, antara lain : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Martono (2002) mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi investor, kreditor, analisis, konsultan keuangan, pialang pemerintah dan manajemen untuk dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu dengan alat bantu berupa laporan. Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain.

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009), penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan apakah perusahaan yang bersangkutan mencapai

target yang ditetapkan atau tidak. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*“, yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003).

Terdapat keragaman pendapat mengenai analisis rasio keuangan dalam praktek bisnis dan ekonomi, mulai dari yang menginginkan rasio keuangan tersebut dijadikan indikator paling penting hingga yang beranggapan minimalis terhadap rasio keuangan tersebut. Kenyataannya, praktek bisnis yang nyata masih mengaplikasikan analisa rasio keuangan ini sebagai salah satu model analisis keuangan, meskipun relevansinya tentu bersifat sangat subyektif, tergantung kepada tujuan dan kepentingan masing-masing analis (Bambang, 2002).

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005)

“Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio”. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perlambangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada penganalisa baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan.

Dalam mengukur kinerja operasi perusahaan dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan melalui kinerja laporan keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin tinggi ROA yang diperoleh maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2001).

Menurut Brigham dan Houston (2001), “Rasio laba

bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda, uji determinasi dan uji signifikansi.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja keuangan perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sebagai dasar perhitungan model regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 0,176 + 0,309X_1 + 0,200X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai konstanta sebesar 0,176 menggambarkan bahwa jika Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* dianggap 0 maka Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,176 satuan.
- b. Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris sebesar 0,309 mempunyai makna apabila Dewan Komisaris ditingkatkan (satu) satuan, maka Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,309 satuan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara Dewan Komisaris terhadap Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
- c. Koefisien regresi variabel *Good Corporate Governance (GCG)* sebesar 0,200 mempunyai makna apabila *Good Corporate Governance (GCG)* ditingkatkan (satu) satuan, maka Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 0,200 satuan. Perubahan tersebut

menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

2. Analisis Determinasi

Untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variabel yang diteliti rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi (D) adalah $D = R^2 \times 100\%$. Besarnya R^2 dapat diperoleh dari besarnya nilai koefisien R *square*. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada lampiran 2 diperoleh informasi tentang nilai koefisien determinasi (D) sebesar $0,565 \times 100\% = 56,5\%$, yang artinya bahwa Kinerja keuangan dipengaruhi oleh Dewan Komisari dan *Good Corporate Governance (GCG)* sebesar 56,5%. Sedangkan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada analisis ini.

3. Uji Signifikansi dengan Uji F

Nilai $F_{hitung} = 10,804$ dibandingkan dengan nilai $F_{tabel} = 3,39$ maka nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} . Ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 5% secara statistik Dewan Komisaris (X_1) dan *Good Corporate Governance (GCG)* (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan (berpengaruh nyata) terhadap

kinerja keuangan (Y) di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang berbunyi “Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia” adalah teruji kebenarannya.

4. Uji Signifikansi dengan Uji t

a. Menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja keuangan perusahaan

Oleh karena t_{hitung} (4,932) > t_{tabel} (1,708) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti secara parsial Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama tentang ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dewan Komisaris terhadap Kinerja keuangan diterima

b. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja keuangan

Oleh karena t_{hitung} (3,056) > t_{tabel} (1,708) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti secara parsial *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua tentang ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Kinerja keuangan diterima.

E. KESIMPULAN

1. Dari hasil persamaan regresi berganda didapat bahwa Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang artinya jika Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* baik, maka akan menyebabkan peningkatan Kinerja keuangan perusahaan.
2. Secara simultan (bersama-sama) Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 56,5%. Berarti Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memberikan sumbangan positif terhadap Kinerja keuangan sebesar 56,5% pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Secara parsial Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh positif

yang signifikan terhadap Kinerja keuangan perusahaan.

SARAN-SARAN

1. Dewan Komisaris dan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki peranan penting terhadap Kinerja keuangan, oleh karena itu pihak manajemen hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan peran Dewan Komisaris serta membentuk *Good Corporate Governance (GCG)* yang profesional.
2. Berhubung kedua faktor tersebut berpengaruh di bawah 100%, maka dipandang masih perlu untuk mengkaji faktor lain selain kedua faktor tersebut dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adriyati M, Sinaga. 2011. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Diponegoro

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, PT. Indeks

kelompok gramedia, Jakarta.

- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Salemba Empat: Jakarta
- Bathala, C.T et al. 1994," *Managerial ownership, debt policy and the impact of holdings: an agency perspective*" *Financial Management*, vol.23, no.3, Autumn.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Penelitian Studi Kasus* [online]. Tersedia <http://www.skripsimahasiswa.blogspot.com/> [2 April 2008]
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan* (corporate governance). Jakarta
- Ghozali, Imam. 2009. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporet Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi*

- Kelangsungan Uasaha*.
Jakarta : kencana.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta
- Singgih, Santoso. 2001. *Statistik Parametrik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sukrisno Agoes. 2006. *Auditing Jilid I*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi ke 10. Bandung:Alfabeta, CV.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taridi, Tirmidzi. Perkembangan GCG di Indonesia. Seminar Nasional " *Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modeling GCG in Financial Accounting and Modeling GCG in Indonesia*". Yogyakarta
- Utama, Sidharta. 2007. "Evaluasi infrastruktur pendukung pelaporan tanggung jawab social dan lingkungan di Indonesia". *Pidato ilmiah pengukuhan guru besar FEUI*. Jakarta www.csrindonesia.com
- Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia", Skripsi, Universitas Diponegoro
- Yulia, Setyarini. 2011. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kewirausahaan* Volume 5 Nomor 2.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung : Alfabeta